



LAPORAN KINERJA

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

**Tahun
2025**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Joni Haryadi D

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)

Ketua Tim Penyusun

Gleni Hasan Huwoyon

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota Tim Penyusun

Adinda Rizkylia Shahrani

Sub Koordinator Kelompok Tata Operasional

Armin Hidayat

Sub Koordinator Kelompok Tata Usaha

Endah Susiyanti

Sub Koordinator Kelompok Pelayanan Teknis

Sekretariat

Shella Savitri

Staf Kelompok Tata Operasional

Yuni Setyowati

Staf Kelompok Tata Operasional

Susiyanti

Staf Kelompok Tata Operasional

Iswahyudi

Staf Kelompok Tata Operasional

Ipan Dahniar

Staf Kelompok Tata Operasional

Kontributor

Ifana Agustina

Staf Kelompok Tata Usaha (Kepegawaian)

Dewinta Hesti Widyastantri

Staf Kelompok Tata Usaha (Keuangan)

Fitri Rahmawati

Staf Kelompok Pelayanan Teknis

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan rahmat-Nya penyusunan buku **"Laporan Kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Tahun Anggaran 2025"** dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas BRBIH dalam melaksanakan Program Perikanan budidaya ikan hias untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya erat kaitannya terselenggaranya *good governance* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRBIH Tahun 2025 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja TA 2025. Laporan ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi pada Tahun 2025. Capaian Kinerja ini dapat tercapai berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai BRBIH baik instuktur, fungsional lain dan personil manajerial. Diharapkan pada tahun 2025 kegiatan-kegiatan yang diamanatkan pada BRBIH dapat terlaksana secara optimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja BRBIH Tahun 2025 ini, atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami membuka sekiranya jika ada saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.

Depok, 21 Januari 2026

Kepala BRBIH



Joni Haryadi D

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Keragaan SDM	4
E. Sistematika Laporan Kinerja	4
F. Potensi dan Permasalahan	6
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2025	13
C. Perjanjian Kinerja	15
D. Pengukuran Kinerja	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	62
C. Efisiensi Anggaran, Sumber Daya, dan Aset	67
D. Capaian Lainnya	72
IV. PENUTUP	78
A. Capaian Kinerja	78
C. Permasalahan dan Rekomendasi	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Tahun 2025.....	viii
Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias	8
Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029	12
Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2025	13
Tabel 5. Rincian Revisi DIPA	13
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025.....	17
Tabel 7. Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator 1	21
Tabel 10. Perbandingan Capaian IK 1 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	22
Tabel 11. Efisiensi Anggaran IK 1	24
Tabel 12. Bobot Nilai IKPA 2025.....	25
Tabel 13. Kategori Nilai IKPA.....	26
Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator 2.....	26
Tabel 15. Perbandingan Capaian IK 2 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	27
Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator IKPA Tahun 2025 dan 2024	27
Tabel 17. Efisiensi Anggaran IK 2.....	29
Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator 3.....	31
Tabel 19. Perbandingan Capaian IK 3 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	31
Tabel 20. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH	32
Tabel 21. Efisiensi Anggaran IK 3.....	32
Tabel 22. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	33
Tabel 23. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	33
Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator 4.....	34

Tabel 25. Perbandingan Capaian IK 4 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	34
Tabel 26. Efisiensi Anggaran IK 4.....	36
Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator 5.....	39
Tabel 28. Perbandingan Capaian IK 5 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	41
Tabel 29. Efisiensi Anggaran IK 5.....	42
Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja 6.....	45
Tabel 31. Perbandingan Capaian IK 6 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	45
Tabel 32. Efisiensi Anggaran IK 6.....	47
Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 7.....	50
Tabel 34. Perbandingan Capaian IK 7 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	51
Tabel 35. Efisiensi Anggaran IK 7.....	52
Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja 8.....	54
Tabel 37. Perbandingan Capaian IK 8 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	54
Tabel 38. Efisiensi Anggaran IK 8.....	56
Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 9.....	58
Tabel 40. Perbandingan Capaian IK 8 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP	59
Tabel 41. Efisiensi Anggaran IK 9.....	61
Tabel 42. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2025	63
Tabel 43. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2025	63
Tabel 44. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025.....	64
Tabel 45. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRBIH Tahun 2025	67
Tabel 46. Dampak Inovasi LFC BRBIH	74
Tabel 47. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2025	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerja Level 3 BRBIH	vii
Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH	4
Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2025	4
Gambar 4. Status Indeks capaian IKK	19
Gambar 5. <i>Dashboard</i> Kinerja BRBIH Tahun 2025	19
Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Tahun 2025	28
Gambar 7. Dashboard Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH Tahun 2025	35
Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025	37
Gambar 9. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025	38
Gambar 10. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025.....	38
Gambar 11. Kategori Nilai IP ASN.....	38
Gambar 12. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian	39
Gambar 13. Dashboard Kinerja BRBIH level 3 BRBIH	78

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan visi dan misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), pada bulan Januari 2025 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BRBIH dengan Plt. Sekretaris BPPSDMKP sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dalam perjanjian kinerja tersebut ditetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja BRBIH Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) pada perspektif yang telah ditetapkan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, BRBIH mencatat Nilai Kinerja Organisasi sebesar 110,73%, yang menunjukkan capaian kinerja sangat baik. Secara keseluruhan, dari 9 indikator kinerja yang diukur, terdapat 5 indikator dengan notifikasi hijau dan 4 indikator dengan notifikasi biru, yang menggambarkan ketercapaian target kinerja secara optimal sebagaimana dashboard kinerja berikut:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH

Seluruh indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan “Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” berhasil mencapai dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencakup aspek pengawasan, pelaksanaan dan perencanaan anggaran, akuntabilitas kinerja, profesionalitas ASN, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMN, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta keterbukaan informasi publik, yang secara umum menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi BRBIH sebagaimana data berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025					110,73
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	100,00
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	108,70
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	84,25	103,37
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	120,00
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	88,89	108,40
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	120,00
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	118,75
		8 Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	195.154.380	107,36
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	99,05	110,06

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRBIH pada Tahun 2025 mencapai Rp.7.831.991.183 atau 98,37% dari pagu anggaran sebesar Rp.7,961,516,000, berdasarkan data aplikasi OM-SPAN per 31 Desember 2025. Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BRBIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH di masa mendatang. BRBIH berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



Bab 1

Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b) Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BRBIH dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Laporan Kinerja BRBIH Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BRBIH serta

sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRBIH guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi BRBIH, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja BRBIH merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRBIH untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, BRBIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM).

BRBIH mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut berdasarkan lingkungan fisik, dengan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut meliputi perbenihan dan sistem, reproduksi, domestikasi dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah Ikan hias, nutrisi dan teknologi pakan, sistem ikan, lingkungan, serta teknologi budidaya ikan hias;

3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut;
4. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
5. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut BRBIH di dukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

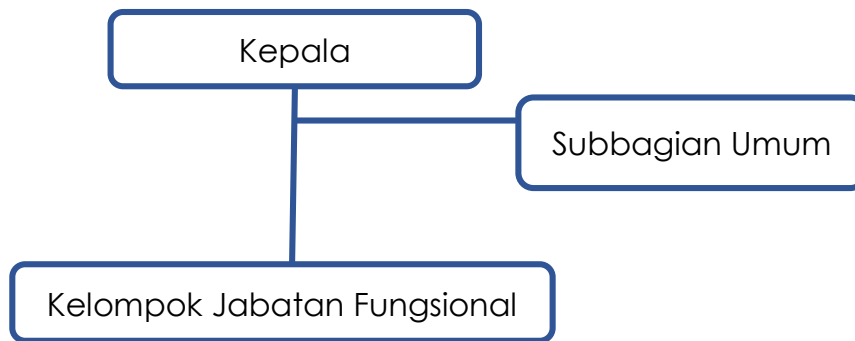
a. Subbagian Umum

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala BRBIH dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

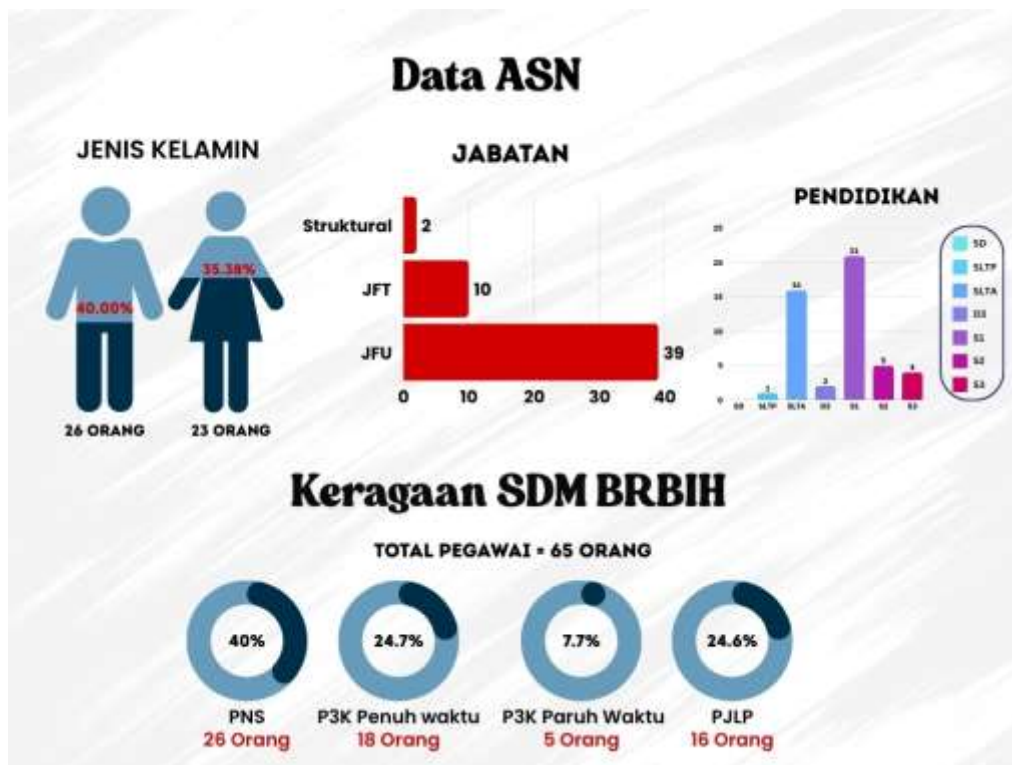
Struktur organisasi BRBIH sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH

D. Keragaan SDM

SDM BRBIH pada Tahun 2025 sebanyak 65 orang yang terdiri dari 49 orang dengan status ASN dan 16 orang dengan status PJLP. Adapun komposisi SDM BRBIH, sebagai berikut:



Sumber : Portal KKP

Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2025

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

a. Cover Laporan

b. Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi tentang pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BRBIH

c. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.

d. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

e. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

f. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

Bab ini berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

F. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

1. Sumber Daya Manusia

Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan hias. SDM di balai ini terdiri dari instruktur, teknisi akuakultur, teknisi lapangan dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Para instruktur, teknisi akuakultur dan teknisi lapangan di balai riset ini memiliki pengalaman luas dalam teknik budidaya ikan hias, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern. Mereka juga berkompeten dalam manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit, yang menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya ikan hias.

Dengan adanya SDM yang handal, BRBIH turut aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam budidaya ikan hias.

Tidak hanya itu, BRBIH juga terus mendukung pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias melalui program pelatihan dan workshop. Dengan keahlian yang dimiliki, SDM di Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri ikan hias Indonesia, menciptakan peluang pasar baru, serta mendukung konservasi spesies ikan hias yang langka dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Sumber Daya Ikan

Potensi ikan hias Indonesia tidak hanya bersumber dari air tawar, ikan hias laut juga cukup prospektif untuk dikembangkan, selain dari itu kita sadari bahwa potensi ikan hias akan mengalami eksploitasi yang berlebihan apabila dimanfaatkan secara tidak efisien, tidak dikelola secara arif dan bijaksana dan akhirnya kekurangan persediaan atau bahkan kehilangan spesies. Sebagai pasar ikan hias terbesar di dunia, adanya regulasi pasar ikan hias di Eropa yang mensyaratkan ekspor beberapa komoditas ikan hias harus dari hasil budidaya dapat menjadi peluang dan tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar tersebut.

Melihat hal tersebut maka BRBIH sebagai satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak dalam pengembangan budidaya ikan hias tentu saja berpotensi sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Saat ini, sumberdaya ikan yang masih dibudidayakan di BRBIH terdiri atas ikan hias air tawar dan masih dibudidayakan, diantaranya Ikan Arwana, Koi, Discus dan Platy disamping budidaya komoditas maggot sebagai pakan alternatif. Ikan hias dari hasil samping kegiatan riset beberapa tahun sebelumnya masih terpelihara sebagai ikan koleksi yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang ke BRBIH.

3. Sarana dan Prasarana

Selain potensi berupa SDM dan Sumber Daya Ikan, BRBIH juga memiliki potensi sarana dan prasarana berupa lahan yang dimiliki seluas 12,5 Ha dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan. Sejak beralihnya fungsi riset di tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian fungsi sarana dan prasarana yang ada dan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, diantaranya cluster loca feed, cluster tanaman hias air dan cluster

arwana. Penggunaan lahan untuk fasilitas lainnya masih terus dikembangkan dan dituangkan dalam site plan BRBIH yang disiapkan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias

NO	FASILITAS	FUNGSI	KEGIATAN
1	Laboratorium Uji	Lab. Genetika	analisa molekuler seperti RAPD, PCR, MHC, Uji KHV
		Lab. Nutrisi	-
		Lab. Kualitas Air	analisa kualitas air dengan berbagai parameter fisika dan kimia seperti Amonia, Nitrit, Nitrat, Suhu, Oksigen Terlarut, pH, Alkalinitas, Kesadahan, TSS, Konduktivitas,
		Lab. Biologi	Budidaya tanaman hias air
		Lab. Pakan Alami	Budidaya pakan alami berupa moina dengan hasil samping cacing beku
2	Hatcheri/ hanggar	Aquatia 1	Budidaya ikan hias platy
		Aquatia 2	Budidaya ikan hias Koi dan Koki
		Aquatia 3	Gedung serba guna
		Aquatia 4	Budidaya discuss dan pemeliharaan ikan koleksi
		Klaster Arwana	Budidaya ikan hias arwana
		Klaster Loca Feed	Budidaya magot dan produksi pakan buatan dengan produk turunan magot
3	Kolam/Bak Pemeliharaan	Kolam Beton	Pemeliharaan Ikan Koi
		Kolam Tanah	Budidaya ikan koi
		Bak Beton	Budidaya ikan platy, pembesaran ikan koki
4	Gedung Penunjang	Gedung Administrasi	Pusat keadministrasian BRBIH
		Gedung Instruktur	Ruang kerja instruktur dan teknisi serta mahasiswa PKL/Magang
		Guest house	Sarana pendukung untuk tamu dan peserta magang, pkL dan penelitian
		Showroom	Sarana untuk menampilkan berbagai jenis ikan hias sebagai sumber edukasi bagi masyarakat
		Musholla	Sarana ibadah umat muslim di lingkungan BRBIH
		Stokist Room	Sarana penyimpanan barang persediaan dan barang operasional perkantoran

Sumber: Data BMN BRBIH 2025

b. Permasalahan

Saat ini masalah dan tantangan yang sedang dihadapi BRBIH dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP diantaranya

adalah beralihnya fungsi riset ke BRIN menyebabkan tugas dan fungsi BRBIH sebagai Balai Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Belum terbitnya peraturan perundangan perihal Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) akibat peralihan riset mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), BRBIH berperan dalam mendukung Rencana Strategis BPPSDMKP. Visi BPPSDMKP sebagaimana tercantum dalam Renstra BPPSDMKP Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.”

Visi BPPSDMKP sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) merumuskan visi spesifik, yaitu “Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan .” Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan.

Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi implementatif yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

Dalam Renstra BPPSDMKP dijelaskan bahwa mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 untuk melaksanakan Misi Menteri Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP melaksanakan 1 dari 4 Misi/Asta Cita KKP yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan” Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

Sebagaimana tercantum dalam Renstra BPPSDMKP, Sasaran Strategis (SS) Pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya Kualitas SDM KP” dan SS-5 “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas”. Untuk mendukung SS-4 dan SS-5 tersebut, BPPSDM menjabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target 2025	Target 2029
SS-4: Meningkatkan Kualitas SDM KP	SP-1: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP	Persentase lulusan pendidikan/pelatihan KP yang kompeten/ tersertifikasi dan terserap di DUDIKA	75%	79%
		Persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama yang ditingkatkan kelasnya	50%	58%
SS-5: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	SP-2: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM (Indeks)	86	88

Sumber: Renstra BPPSDM KP 2025-2029

Berdasarkan Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2025, BRBIH mendukung SS-5 KKP dengan Sasaran Program SP-2 BPPSDMKP.

Dalam mendukung SP-2 tersebut, BRBIH mengacu kepada Rencana Kerja KKP Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2024.

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan mengacu kepada Rencana Kerja KKP dan BPPSDM, pada tahun 2025 ditetapkan 1 program kerja pada BRBIH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.961.516.000
Jumlah Anggaran		7.961.516.000

Sumber: DIPA BRBIH Tahun 2025

Seiring berjalannya kegiatan terdapat beberapa perubahan DIPA dengan beberapa penyesuaian dalam dukungan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2024	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1	Tanggal	2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Blokir Anggaran berdasarkan: surat Sekretaris BPPSMKP Nomor B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Penyampaian Efisiensi Anggaran Lingkup BPPSDM TA 2025	
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-327/AG/AG.3/2025 Tanggal 9 April 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat perubahan pagu per jenis belanja, hanya ada pembukaan blokir belanja gaji PPNPN dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan.	
3	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	
4	Tanggal	21 April 2025	8 Juli 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	
5	Tanggal	8 Juli 2025	1 September 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	3.201.539.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	7.761.516.000
	Keterangan	Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.5139/BPPSDM.1/RC.410/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025 Perihal Penghapusan Blokir Lingkup BPPSDM diinstruksikan kepada seluruh UPT lingkup BPPSDMKP untuk melakukan penghapusan blokir untuk mendukung revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan kelautan dan perikanan	
6	Tanggal	1 September 2025	3 Oktober 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	3.201.539.000	3.201.539.000
	Total Anggaran	7.761.516.000	7.761.516.000
	Keterangan	Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 dan Nomor 8/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025	
	Tanggal	3 Oktober 2025	19 November 2025

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
7	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	3.201.539.000	3.401.539.000
	Total Anggaran	7.761.516.000	7.961.516.000
	Keterangan	Berdasarkan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-986/AG/AG.3/2025 Tanggal 19 November 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 disahkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp10.969.977.000, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp4.559.977.000 dan Belanja Barang sebesar Rp6.410.000.000.

Sepanjang Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan beberapa kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Revisi Ke-1 (21 Februari 2025)

Revisi ini merupakan tindak lanjut atas surat Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal penyampaian efisiensi anggaran lingkup BPPSDM TA 2025. Pada revisi ini tidak terdapat perubahan pagu anggaran, baik pada Belanja Pegawai maupun Belanja Barang. Total anggaran tetap sebesar Rp10.969.977.000. Revisi dilakukan dalam rangka penyesuaian kebijakan efisiensi dan blokir anggaran.

Revisi Ke-2 (9 April 2025)

Revisi ini berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-327/AG/AG.3/2025 tanggal 9 April 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada revisi ke-2 ini tidak terjadi perubahan pagu per jenis belanja, namun dilakukan pembukaan blokir pada beberapa akun, yaitu belanja gaji PPNN

dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan. Total pagu tetap sebesar Rp10.969.977.000.

Revisi Ke-3 (21 April 2025)

Revisi ini berupa penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, tanpa perubahan pagu anggaran. Total anggaran tetap sebesar Rp10.969.977.000.

Revisi Ke-4 (8 Juli 2025)

Revisi kembali dilakukan untuk penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA, tanpa mengubah pagu Belanja Pegawai maupun Belanja Barang. Total pagu tetap sebesar Rp10.969.977.000.

Revisi Ke-5 (1 September 2025)

Berdasarkan surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.5139/BPPSDM.1/RC.410/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang penghapusan blokir lingkup BPPSDMKP dalam rangka mendukung revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan kelautan dan perikanan, dilakukan penyesuaian pagu Belanja Barang dari Rp6.410.000.000 menjadi Rp3.201.539.000.

Dengan demikian, total anggaran mengalami penurunan dari Rp10.969.977.000 menjadi Rp7.761.516.000, sementara Belanja Pegawai tetap sebesar Rp4.559.977.000.

Revisi Ke-6 (3 Oktober 2025)

Revisi ini dilakukan menindaklanjuti Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 dan Nomor 8/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025.

Pada revisi ini tidak terdapat perubahan pagu anggaran, baik Belanja Pegawai maupun Belanja Barang. Total anggaran tetap sebesar Rp7.761.516.000.

Revisi Ke-7 (19 November 2025)

Berdasarkan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-986/AG/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025 tentang Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup BPPSDMKP, dilakukan penambahan Belanja Barang dari Rp3.201.539.000 menjadi Rp3.401.539.000.

Dengan adanya revisi ini, total anggaran meningkat menjadi Rp7.961.516.000, sedangkan Belanja Pegawai tetap sebesar Rp4.559.977.000.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran program dan kegiatan secara optimal dan tepat waktu, pada tahun 2025 disusun Perjanjian Kinerja BRBIH dengan 1 sasaran kegiatan (SK) yang harus dicapai sebelum akhir tahun. Untuk mengukur keberhasilan SK, ditetapkan ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BRBIH pada tahun 2025 berjumlah 9 IK, dengan rincian pada PK sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Sumber: Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025

Perjanjian kinerja level 3 BRBIH telah di revisi sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada Bulan Desember Tahun 2025. Berikut tabel penjelasan revisi Perjanjian Kinerja level 3 BRBIH:

Tabel 7. Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	POIN PERUBAHAN	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
REVISI I			
1.	Bulan penandatanganan Perjanjian Kinerja	30 Januari 2025	5 Desember 2025
2.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 2	Rudi Alex Wahyudin	Joni Haryadi D
3	Dasar perubahan PK	Nota Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor: 3961/BPPSDM/RC.610/XII/2025 Tanggal: 1 Desember 2025 Hal: Tindak Lanjut Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja BPPSDM KP Tahun 2025	

Sumber: Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan Revisi terhadap Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Level III. Revisi ini mencakup perubahan waktu penandatanganan dokumen serta pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja. Semula, Perjanjian Kinerja ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2025, kemudian direvisi menjadi tanggal 5 Desember 2025. Perubahan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap dokumen perencanaan kinerja yang telah diperbarui.

Selain itu, terdapat perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja Level II, dari Rudi Alex Wahyudin menjadi Joni Haryadi D, sebagai bentuk penyesuaian terhadap pejabat yang menjabat pada saat penetapan perubahan dokumen.

Revisi Perjanjian Kinerja tersebut dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas dari Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 3961/BPPSDM/RC.610/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja BPPSDM KP Tahun 2025.

D. Pengukuran Kinerja

Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, sehingga diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 4. Status Indeks capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRBIH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkup BRBIH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: 19/BRBIH/RC.610/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan instrumen fundamental bagi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa visi dan misi organisasi selaras dengan realisasi di lapangan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi dan penetapan kinerja tahun 2025.

Seluruh pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) BRBIH mengacu pada kerangka kerja logis (*Logical Framework Analysis*) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi melalui sistem aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Integrasi data ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran bersifat transparan dan objektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja akhir tahun 2025, BRBIH berhasil mencatatkan kinerja korporat yang sangat positif dengan rata-rata capaian sebesar 110,73%. Dari total indikator yang dikelola, sebaran status capaian pada *dashboard* Kinerjaku adalah sebagai berikut:

- 4 Indikator Kinerja berstatus Biru: Menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.
- 5 Indikator Kinerja berstatus Hijau: Menunjukkan capaian yang berhasil memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Hasil ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran BRBIH dalam menjaga kualitas performa organisasi tetap berada pada level optimal. Rincian sebaran status capaian tersebut disajikan pada tampilan *dashboard* kinerjaku berikut ini:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Tahun 2025

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dilakukan secara sistematis melalui mekanisme pengukuran kinerja yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Instrumen ini digunakan sebagai parameter objektif untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dalam mewujudkan visi dan misi organisasi, serta sebagai dasar pertanggungjawaban atas kontrak kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Pengukuran kinerja ini mengintegrasikan capaian riil di lapangan dengan target yang telah diidentifikasi dalam Peta Strategi BRBIH. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, secara kolektif BRBIH mencatatkan performa yang sangat impresif dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025 sebesar 110,73%. Capaian ini merupakan akumulasi dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) yang seluruhnya berhasil memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2025

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025					110,73
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	100,00
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	108,70
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	84,25	103,37
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	120,00
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	88,89	108,40
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	120,00
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	118,75
		8 Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	195.154.380	107,36
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	99,05	110,06

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan gambaran umum capaian yang tersaji dalam Tabel 7, bagian selanjutnya akan menguraikan analisis lebih mendalam pada masing-masing indikator kinerja secara spesifik. Analisis ini mencakup evaluasi teknis, faktor-faktor pendukung keberhasilan, kendala yang dihadapi, serta keterkaitan antara efisiensi anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Berikut adalah pembahasan rincian capaian untuk masing-masing Indikator Kinerja (IK) BRBIH sepanjang tahun 2025:

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal. Pengukuran dilakukan secara triwulanan dengan menghitung perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah berstatus tuntas terhadap total rekomendasi yang diberikan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Indikator ini bersifat maximize, dimana capaian yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya komitmen unit dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala BPPSDMKP Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026, BRBIH mencatatkan realisasi kinerja sebesar 85% dari target yang ditetapkan sebagaimana data berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator 1

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKU 1 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
		75	100	85	85	100,00	-15,00	89	95,51

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Merujuk pada data diatas, capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mendapat nilai capaian sebesar 85% (100%) dari target 85% dan mengalami penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan Tahun 2024. Meskipun terdapat

penurunan sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai 100%, hal ini tidak merepresentasikan penurunan kualitas kinerja organisasi, dikarenakan pada tahun sebelumnya, BRBIH memiliki 2 rekomendasi Itjen yang telah dituntaskan seluruhnya, sedangkan hingga akhir periode tahun 2025, BRBIH tidak memiliki rekomendasi pengawasan baru yang harus difindaklanjuti. Sementara itu, dalam kerangka target jangka menengah tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 89%, capaian tahun 2025 telah melampaui target tersebut dengan tingkat pencapaian sebesar 95,51% terhadap target 2029.

Oleh karena itu, capaian kinerja secara otomatis disesuaikan dengan target maksimal tahun berjalan. Capaian ini juga selaras dengan seluruh satuan kerja level III di bawah binaan Sekretariat BPPSDMKP yang secara kolektif mencapai target 100%, mengindikasikan bahwa fungsi pencegahan dan pengendalian di tingkat internal telah berjalan dengan sangat baik di seluruh unit sebagaimana data berikut:

Tabel 10. Perbandingan Capaian IK 1 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRBIH	85	85	100,00
2	LRSDKP	85	85	100,00
3	BRPL	85	85	100,00
4	BRPSDI	85	85	100,00
5	BRPI	85	85	100,00
6	LRPT	85	85	100,00
7	LRBRL	85	85	100,00
8	LRMPHP	85	85	100,00
9	LPTK	85	85	100,00

Sumber: Nota Dinas Kepala BPPSDMKP Nomor B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026

Capaian yang seragam diseluruh satker menunjukkan bahwasannya seluruh satker telah melakukan pengelolaan pengawasan yang optimal.

Keberhasilan BRBIH dalam menjaga kualitas tata kelola sehingga tidak memunculkan rekomendasi atau temuan pengawasan baru didukung oleh efektivitas fungsi pencegahan di tingkat internal. Faktor pendukung utama dalam pencapaian ini adalah penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) yang dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan melalui pelaporan rutin pada aplikasi Silastri serta Portal KKP.

Selain itu, komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan menjadi kunci krusial melalui pelaksanaan *briefing* rutin setiap pagi dan sore hari di masing-masing klaster, serta rutin melaksanakan rapat mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kendala secara cepat dan tepat. Agenda ini berfungsi sebagai wadah deteksi dini untuk memitigasi risiko operasional dan teknis sebelum menjadi kendala yang lebih besar. Upaya pengawalan ini juga diperkuat dengan rapat koordinasi SPIP bulanan serta monitoring aktif pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut), guna memastikan seluruh administrasi dan operasional organisasi tetap berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku."

Program utama yang menjadi pilar keberhasilan capaian indikator ini adalah Layanan Manajemen Keuangan. Keberhasilan tersebut dicapai melalui pelaksanaan pengendalian internal secara intensif yang dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Kerja dan para penanggung jawab kegiatan pada setiap minggunya. Selain itu, guna memastikan pengawasan berjalan hingga level operasional, dilaksanakan kegiatan *briefing* pagi dan sore setiap hari di masing-masing klaster. Agenda ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan memitigasi faktor-faktor risiko secara *real-time*, yang didukung penuh oleh komitmen pimpinan dalam menjaga integritas serta kepatuhan pada setiap lini pengawasan internal.

Upaya pengawalan terhadap pencapaian indikator ini juga dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi SPIP bulanan. Forum ini berfungsi sebagai wadah evaluasi untuk mengantisipasi potensi kendala administratif maupun operasional yang mungkin muncul. Secara teknis, pemantauan juga diperkuat melalui monitoring berkala pada aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Tindak Lanjut) untuk memastikan seluruh arahan dari Inspektorat Jenderal telah terkelola dengan baik.

Melalui sinergi antara pengawasan yang ketat dan manajemen yang terukur, BRBIH berhasil menjaga kualitas kinerja dengan penggunaan sumber daya yang sangat optimal. Kaitan antara efektivitas pengawalan program tersebut dengan efisiensi anggaran yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Efisiensi Anggaran IK 1

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	% Capaian Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	100	104,35	Layanan Manajemen Keuangan	3.290.000	3.254.970	98,94	5,41

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja ini didukung oleh anggaran yang bersumber dari Layanan manajemen keuangan dengan nilai efisiensi sebesar 5,41, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk IK ini memiliki nilai efisiensi yang baik. Alokasi anggaran Layanan manajemen keuangan digunakan untuk mendukung dua indikator kinerja yaitu Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH yang ditargetkan sebesar 92, dengan capaian 100, sehingga persentase capaian 108,70%. Penggunaan anggaran secara bersamaan menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRBIH merupakan ukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta capaian output kegiatan. Pengukuran dilakukan berdasarkan komponen

penilaian yang telah ditetapkan dan bersifat *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai IKPA menunjukkan semakin baik kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.

IKPA tidak hanya mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan revisi DIPA, akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD), kualitas belanja kontraktual, ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, serta capaian output kegiatan. Dengan demikian, nilai IKPA mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan BRBIH dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Periode pengukuran IKPA dilaksanakan secara semesteran, dengan nilai yang digunakan dalam pelaporan kinerja merupakan nilai posisi akhir pada semester berjalan. Semester I mencakup periode Januari sampai dengan Juni, sedangkan Semester II merupakan nilai kumulatif Januari sampai dengan Desember (nilai akhir tahun). Meskipun monitoring dilakukan secara berkala melalui aplikasi OM SPAN, nilai yang digunakan dalam laporan kinerja adalah nilai resmi pada akhir periode semester.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan 3 indikator penilaian yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel 12. Bobot Nilai IKPA 2025

Bobot Nilai IKPA 2020

No	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (halaman III DIPA)	15
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan anggran	20
4	Belanja kontraktual	10
5	Penyelesaian tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian output	25

Sumber: Per-5/PB/2024

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id> dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut:

Tabel 13. Kategori Nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	≥ 95	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	< 70	Kurang

Sumber: Per-5/PB/2024

Berdasarkan data yang dihimpun melalui aplikasi OM-SPAN dan diperkuat oleh Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026, BRBIH berhasil meraih nilai 100,00 pada tahun 2025. Capaian ini masuk dalam kategori "Sangat Baik" dengan tingkat persentase mencapai 108,70% dari target tahun berjalan. dengan rincian capaian dan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Indikator 2

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 2 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
94,58	88,52	94,37	99,65	92	100	108,70	0,35	92,20	108,46

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 (99,65), terdapat kenaikan sebesar 0,35%. Selain itu, realisasi ini juga telah melampaui target jangka menengah (2029) sebesar 92,20 dengan persentase capaian terhadap target jangka menengah mencapai 108,46%. Sementara jika di bandingkan dengan capaian satker level 3 di bawah binaan sekretariat BPPSDMKP dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perbandingan Capaian IK 2 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRBIH	92	100,00	108,70
2	LRMPHP	92	99,83	108,51
3	BRPL	92	99,65	108,32
4	BRPI	92	99,49	108,14
5	LRBRL	92	98,93	107,53
6	BRPSDI	92	98,13	106,66
7	LPTK	92	96,49	104,88
8	LRSDKP	92	95,85	104,18
9	LRPT	92	92,20	100,22

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Prestasi ini menempatkan BRBIH pada peringkat pertama dari 9 satuan kerja di bawah pembinaan Sekretariat BPPSDMKP, faktor pendukung tercapainya IK ini disebabkan antara lain:

- 1) Adanya kenaikan capaian indikator deviasi halaman III DIPA. Capaian pada tahun sebelumnya sebesar 13,45 meningkat menjadi 15. Hal ini dikarenakan deviasi antara realisasi dengan rencana penarikan dana $\leq$ 5% setiap bulannya.
- 2) Capaian Pengelolaan UP dan TUP mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,87 meningkat menjadi 10. Hal ini di karenakan GUP, PTUP dan penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah telah dikelola dengan baik, tepat waktu dan efisien.

Dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator IKPA Tahun 2025 dan 2024

Indikator	Tahun/ Nilai		Kenaikan/ Penurunan
	2024	2025	
Revisi DIPA	10	10	-
Deviasi Halaman III DIPA	13,46	15	1,54
Penyerapan Anggaran	20	20	-
Belanja Kontraktual	10	10	-
Penyelesaian Tagihan	10	10	-
Pengelolaan UP dan TUP	9,88	10	0,12
Dispensasi SPM	-	-	-
Capaian Output	25	25	-

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Sebagaimana tangkap layar pada aplikasi OM-SPAN berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sumber Data : DESKAMIF

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Koreksi Saldo	Dispenasi SPN (Pengarang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Koreksi Bobot)
						Realisasi DIPA	Deviasi Halaman ke DIPA	Penyusunan Anggaran	Belanja Komitmen	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran SP dan TSP					
1	028	032	403030	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00		100.00		100.00				

Sumber : OM-SPAN 2026

Gambar 6. Indikator Pelaksanaan Anggaran BRBIH Tahun 2025

Keberhasilan ini didukung oleh Program/Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan. Aktivitas strategis yang penyusunan RPD triwulanan yang juga dilakukan monitoring berkala terhadap realisasinya, penyusunan laporan semesteran, penyusunan laporan tahunan, rekonsiliasi keuangan, penyusunan laporan pertanggung jawaban bendahara, penyampaian laporan capaian output. Upaya-upaya tersebut memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun fungsional.

Langkah-langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan nilai IKPA ke depan antara lain:

1. Melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran per semester dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
3. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
4. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.

5. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.

Dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya, efektivitas pencapaian nilai 100 ini tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran. Berikut adalah perbandingan antara target kinerja dan realisasi anggaran pendukung pada indikator ini:

Tabel 17. Efisiensi Anggaran IK 2

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	% Capaian Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	108,70	104,35	Layanan Manajemen Keuangan	3.290.000	3.254.970	98,94	5,41

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja ini didukung oleh anggaran yang bersumber dari Layanan Layanan manajemen keuangan dengan nilai efisiensi sebesar 5,41, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang di alokasikan untuk IK ini memiliki nilai efisiensi yang baik. Alokasi anggaran Layanan manajemen keuangan digunakan secara bersamaan untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH dan indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH yang ditargetkan sebesar 85%, dengan capaian 85%, sehingga persentase capaian 100%. Pemanfaatan anggaran secara bersamaan menunjukkan adanya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja 3

Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)

Indikator ini mengukur kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh BRBIH. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan

sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai PM SAKIP BRBIH pada tahun 2025 adalah 81,5 dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH merupakan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja di lingkungan BRBIH, yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan hingga evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi hasil.

Pengukuran indikator ini menggunakan nilai posisi akhir tahunan dengan polarisasi *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kualitas implementasi akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian selanjutnya dikategorikan dalam predikat mulai dari *Sangat Kurang* hingga *Sangat Memuaskan*, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas tata kelola kinerja instansi.

Penilaian Mandiri SAKIP dilaksanakan secara tahunan, dengan sumber data berasal dari hasil penilaian internal satuan kerja yang kemudian diverifikasi oleh Tim SAKIP BPPSDM serta dapat didukung oleh hasil uji petik Inspektorat Jenderal.

Pada tanggal 10-12 Juni 2025 telah dilakukan Penilaian Mandiri yang berlokasi di BRBIH Depok bersama dengan verifikator Sekretariat BPPSDMKP. Berdasarkan hasil penilaian mandiri tersebut, pada Tahun 2025 ini BRBIH telah melampaui target, hal tersebut tertuang pada surat Sekretaris BPPSDMKP atas nama Kepala BPPSDMKP Nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025

Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 3 lingkup BPPSDM dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian Kinerja Indikator 3

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 3 - Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
		82,25	84,25	81,5	84,25	103,37	0,00	82,50	102,12

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Indikator Kinerja PM SAKIP BRBIH tahun 2025 tercapai sebesar 84,25 atau 103,37% tanpa kenaikan dari capaian Tahun 2024, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Tahun ini adalah sebesar 102,12%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian satker Level 3 di bawah binaan Sekretariat BPPSDMKP dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Perbandingan Capaian IK 3 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRBIH	81,50	84,25	103,37
2	BRPSDI	80	83,50	104,38
3	LRMPHP	80	83,50	104,38
4	LPTK	80,05	83,50	104,31
5	BRPI	81	83,50	103,09
6	LRSDKP	81	83,50	103,09
7	LRPT	80,05	83,50	104,31
8	LRBRL	80	83,50	104,38
9	BRPL	80	83,15	103,94

Sumber : surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.4486/BRSDM.1/RC.510/VII/2025

Capaian kinerja BRBIH berada pada urutan ke 1 dari 9 satker level 3 di bawah binaan sekretarian BPPSDMKP. Adapun rincian nilai PM SAKIP Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Komponen Penilaian SAKIP BRBIH

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	25,20	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35	13,35
4	Evaluasi Internal	25	20,50	20,50
Total Nilai			84,25	84,25
Predikat			A	A

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja PM SAKIP BRBIH antara lain:

- 1) Pimpinan instansi telah terlibat langsung dan aktif dalam membangun dan monitoring implementasi SAKIP
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja selama 5 tahun.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 4) Pendampingan SAKIP dan penyusunan LKj oleh Sekretariat BPPSDMKP

Program/Kegiatan yang mendukung capaian IK ini adalah Layanan Pemantauan dan evaluasi berupa pengelolaan dokumen kinerja mencakup dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.

Sementara itu dalam kaitannya dengan efisiensi anggaran capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Efisiensi Anggaran IK 3

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (Nilai)	81,5	84,25	103,37	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	500.000	478.900	95,78	7,59

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Pada tahun 2025 Indikator Kinerja ini didukung oleh anggaran yang bersumber dari Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan nilai efisiensi sebesar 67,59, hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang di alokasikan untuk IK ini memiliki nilai efisiensi yang baik.

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan secara tahunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut:

Tabel 22. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

No	Variabel	Uraian	Bobot
1	Efektivitas (75)	Capaian RO	75
2	Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
		Efisiensi SBK	15

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Tabel 23. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kategori	Nilai KPA
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 80-90
3	Cukup	> 60-80
4	Kurang	< 50

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Capaian BRBIH dapat dilihat pada tabel perbandingan berikut:

Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator 4

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 4 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
			100,00	71,5	100	139,86	0,00	72,50	137,93

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Tabel diatas menunjukkan nilai kinerja perencanaan anggaran BRBIH pada tahun 2024 telah mencapai 100. Pada tahun 2025, dengan target sebesar 71,5, realisasi kinerja kembali mencapai 100, sehingga persentase capaian mencapai 139,86% atau 120% pada aplikasi kinerjaaku. Tidak terdapat kenaikan nilai dibandingkan tahun sebelumnya karena capaian telah mencapai batas maksimal. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 72,50, capaian tahun 2025 telah mencapai 137,93%, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui lebih awal. Sementara itu jika dibandingkan dengan nilai capaian pada satker level 3 dibawah pembinaan Sekretariat BPPSDMKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Perbandingan Capaian IK 4 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRBIH	71,5	100,00	139,86
2	BRPSDI	71,5	100,00	139,86
3	LRBRL	71,5	100,00	139,86
4	BRPL	71,5	100,00	139,86
5	BRPI	71,5	100,00	139,86
6	LRSDKP	71,5	100,00	139,86
7	LRMPHP	71,5	100,00	139,86
8	LPTK	71,5	100,00	139,86

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
9	LRPT	71,5	100,00	139,86

Sumber : Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 138/SJ.2/RC.610/1/2026

BRBIH dan seluruh satker level 3 dibawah binaan Sekretarian BPPSDMKP memperoleh nilai yang sama yaitu 100. Capaian yang seragam ini menunjukkan bahwa seluruh satker level 3 telah melampaui target yang ditetapkan, serta mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan anggaran di bawah pembinaan Sekretariat BPPSDMKP sebagaimana data berikut:



Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu

Gambar 7. Dashboard Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH Tahun 2025

Faktor pendukung tercapainya Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran antara lain perencanaan anggaran yang disusun secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Dimulai dari melakukan monitoring realisasi anggaran setiap layanan agar tidak melebihi indeks Satuan Biaya Keluaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, melakukan penyesuaian anggaran melalui revisi DIPA/ RKAKL sesuai kebijakan dan kebutuhan organisasi, serta melaporkan Progres Capaian Realisasi Output (PCRO) setiap bulannya pada Aplikasi SAKTI.

Dalam upaya mencapai target, Indikator Kinerja ini didukung oleh program/kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran meliputi kegiatan penyusunan KAK, RAB, RKAKL dan DIPA serta revisi DIPA/RKAKL tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi dukungan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp5.895.000 telah direalisasikan Rp5.863.797 atau sebesar 99,47%. Tingginya tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan secara optimal dan efisien, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja. Adapun rasio efisiensi sebesar 40,39 mencerminkan penggunaan anggaran yang efektif dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH, sebagaimana data berikut:

Tabel 26. Efisiensi Anggaran IK 4

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	139,86	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.895.000	5.863.797	99,47	40,39

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Indikator Kinerja 5

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pengukuran indeks ini bertujuan untuk menilai kualitas ASN dalam menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara semesteran dengan menggunakan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki ASN. Dimensi kompetensi diperoleh dari hasil konversi predikat kinerja tahun sebelumnya serta riwayat pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik klasikal maupun non-klasikal selama tahun berjalan. Dimensi kinerja mengacu pada capaian hasil kerja ASN, sedangkan dimensi disiplin mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan kepegawaian.

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 terdapat penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN, berdasarkan surat tersebut penilaian IP ASN KKP pun ikut menyesuaikan. Pada dimensi kompetensi mengalami penyesuaian sebagai berikut:

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN													
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI		
		HASIL PENILAIAN KINERJA													
		Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang	Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	< 20JP	
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional	

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 8. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2025

Sedangkan pada indikator Kualifikasi tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	25	20	10	10	10
Jabatan Administrator	25	25	20	10	10	5
Jabatan Pegawai	25	25	25	20	10	10
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	25	25	25	20	10
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	25	20	10	10	10
Jabatan Pelaksana	25	25	25	25	20	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 9. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025

Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja sebagai berikut:

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 10. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun penilaian IP ASN tersebut meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%) dengan pengkategorian sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sedang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Sumber : Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019

Gambar 11. Kategori Nilai IP ASN

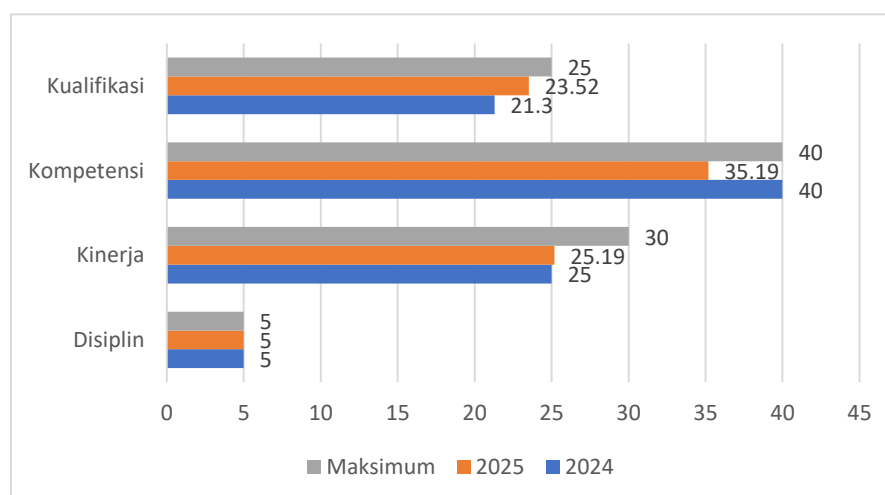
Nota Dinas dari Plt.Sekretaris BPPSDM Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/I/2026 Tanggal 6 Januari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Pengukuran IPASN Tahun 2025 lingkup BPPSDM menyatakan bahwasannya IP ASN BRBIH telah tercapai melampaui dari yang ditargetkan, sebagaimana data perbandingan berikut:

Tabel 27. Capaian Kinerja Indikator 5

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 5 - Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
83,2	80,4	91,3	91,30	82,00	88,89	108,40	-2,64	85,00	104,58

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Capaian kinerja tahun 2025 terealisasi sebesar 88,89, mengalami penurunan 2,64% dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan cara pengukuran. Meskipun demikian, capaian kinerja tahun 2025 tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 82 dengan tingkat capaian 108,40%, serta telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 sebesar 85 dengan capaian 104,58%, sehingga kinerja secara keseluruhan masih berada pada kategori baik, dengan rincian nilai Tahun 2024-2025 setiap dimensinya sebagai berikut:



Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Gambar 12. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian

Berdasarkan rincian nilai Indeks Profesionalitas ASN per dimensi, capaian dimensi Disiplin pada tahun 2024 dan 2025 tetap berada pada nilai maksimal sebesar 5, yang menunjukkan konsistensi tingkat kepatuhan ASN terhadap ketentuan disiplin. Pada dimensi Kinerja, terjadi peningkatan dari 25 pada tahun 2024 menjadi 25,19 pada tahun 2025, yang mencerminkan perbaikan dalam pencapaian kinerja individu ASN.

Sebaliknya, pada dimensi Kompetensi terjadi penurunan nilai dari 40 pada tahun 2024 menjadi 35,19 pada tahun 2025, meskipun masih berada pada kategori baik. Penurunan ini menunjukkan adanya ruang perbaikan dalam pemenuhan pengembangan kompetensi ASN, khususnya terkait pelaksanaan dan pemutakhiran kegiatan pengembangan kompetensi. Sementara itu, dimensi Kualifikasi mengalami peningkatan dari 21,3 pada tahun 2024 menjadi 23,52 pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan dan kesesuaian kualifikasi ASN.

Secara keseluruhan, perubahan nilai pada masing-masing dimensi tersebut mencerminkan dinamika pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan BRBIH, dengan fokus perbaikan ke depan diarahkan pada penguatan pengembangan kompetensi ASN guna meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Sejalan dengan capaian kinerja BRBIH pada tahun 2025 yang tetap melampaui target meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, perlu dilakukan perbandingan capaian antar satuan kerja level 3 dibawah pembinaan sekretariat BPPPSDMKP untuk melihat posisi kinerja BRBIH sebagaimana data berikut:

Tabel 28. Perbandingan Capaian IK 5 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	LRSDKP	82	95,00	115,85
2	BRPSDI	82	93,14	113,59
3	LRMPHP	80,23	91,32	113,82
4	LPTK	83	90,36	108,87
5	BRBIH	82	88,89	108,40
6	BRPL	83	88,50	106,63
7	LRPT	85	88,40	104,00
8	BRPI	83	87,40	105,30
9	LRBRL	82	85,81	105,29

Sumber : Nota Dinas dari Plt.Sekretaris BPPSDM Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/II/2026

Berdasarkan hasil perbandingan capaian kinerja antar satuan kerja level 3, seluruh satker menunjukkan kinerja di atas target yang ditetapkan, dengan persentase capaian berkisar antara 104,00% hingga 115,85%. BRBIH dengan capaian 108,40% berada pada kelompok satker dengan predikat "tinggi". Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian BRBIH sedikit lebih rendah dibandingkan beberapa satker lain, kinerja BRBIH tetap konsisten dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja secara keseluruhan.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN BRBIH merupakan hasil dari berbagai proses pengelolaan sumber daya manusia yang terencana dan terukur berdasarkan beberapa faktor pendukung diantaranya:

- Mendorong seluruh pegawai aktif mengikuti seminar dan diklat sebanyak 20 JP atau lebih untuk meningkatkan dimensi kompetensi.
- Mendorong pegawai yang sedang tugas belajar/izin belajar agar segera menyelesaikan pendidikannya dan selanjutnya diproses pencantuman gelar sehingga nilai pada dimensi kualifikasi dapat meningkat.
- Menghimbau pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan jenjang keahlian agar meningkatkan pendidikan sehingga dapat meningkatkan nilai pada dimensi kualifikasi.

- d. Tetap melakukan upaya penegakan disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.

Dalam kaitannya dengan dukungan program/kegiatan Indikator Kinerja ini didukung oleh Layanan Manajemen SDM dengan fokus kegiatan berupa monitoring capaian kinerja SDM diseluruh dimensi penilaian, dimulai dari monitoring keikutsertaan pegawai pada kegiatan diklat atau seminar, sosialisasi dan monitoring disiplin pegawai serta di dukung dengan pengajuan pencantuman gelar bagi pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan, update data kepegawaian pada e-pegawai dan SIASN, rekapitulasi kehadiran pegawai sebagai monitoring disiplin pegawai Administrasi, dan Rekapitulasi Sasaran Kinerja Pegawai secara akurat dan tepat waktu.

Selain meninjau capaian kinerja secara komparatif antar satuan kerja, analisis selanjutnya difokuskan pada keterkaitan antara capaian kinerja dengan pemanfaatan anggaran, guna menilai tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana data berikut:

Tabel 29. Efisiensi Anggaran IK 5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	%	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)	82	88,89	108,40	Layanan Manajemen SDM	3.200.000	3.158.300	98,70	9,71

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Berdasarkan data Indeks Profesionalitas ASN BRBIH, target indeks sebesar 82 telah direalisasikan 88,89, sehingga capaian kinerja mencapai 108,40%. Pencapaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Layanan Manajemen SDM dengan pagu anggaran sebesar Rp3.200.000 dan realisasi anggaran Rp3.158.300 atau 98,70%. Tingginya capaian kinerja yang diiringi dengan serapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan manajemen SDM telah berjalan efektif dan efisien, dengan rasio efisiensi sebesar 9,71, yang mencerminkan penggunaan anggaran yang proporsional dalam mendukung peningkatan profesionalitas ASN di lingkungan BRBIH.

Sementara itu, untuk terus meningkatkan capaian pada indikator kinerja ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut:

- a. Mengajukan pencantuman gelar bagi pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar.
- b. Tetap melakukan upaya penegakan disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan melalui sosialisasi tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai BRBIH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang memuat kewajiban dan larangan bagi PNS.
- c. Selalu rutin melaksanakan evaluasi kinerja periodik sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Indikator Kinerja 6

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang

akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator dihitung dengan membagi nilai RUP di SiRUP dengan pagu pengadaan, lalu dikalikan 100%. Namun, terdapat ketentuan khusus di mana jika unit kerja mengumumkan RUP melebihi pagu pengadaan (lebih dari 100%), maka selisih kelebihan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator. Data ini dikelola oleh Biro Umum dan PBJ dengan tingkat validitas Output Kendali Rendah dan menggunakan jenis perhitungan Nilai Posisi Akhir.

Pengukuran dilakukan secara triwulanan, di mana penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya dengan bukti dukung berupa Surat atau Nota Dinas dari Biro Umum dan PBJ. Karena memiliki polarisasi *maximize*, semakin tinggi persentase pengumuman yang akurat, maka semakin baik pula kualitas perencanaan PBJ di lingkungan tersebut.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Capaian BRBIH berdasarkan Nota Dinas Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 Tanggal 13 Januari 2026 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat data berikut:

Tabel 30. Capaian Indikator Kinerja 6

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 6 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
				80	100	125,00	-	84	119,05

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Indikator Persentase RUP PBJ ini merupakan IK baru pada Tahun 2025 sesuai yang menjadi IK mandatory dari BPPSDMKP sebagai salah satu upaya untuk menjaga transparansi rencana pengadaan barang dan jasa level UPT. Sesuai data di atas dapat dilihat bahwa BRBIH memperoleh realisasi capaian sebesar 100% dari target 80% dengan persentase capaian kinerja 125% atau 120% pada aplikasi kinerjaku, dikarenakan merupakan IK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 84%, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 119,05%, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui lebih awal. Hal ini mencerminkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara dalam hal perbandingan capaian satuan kerja level 3 lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Perbandingan Capaian IK 6 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRBIH	80,00	100,00	125,00
2	BRPSDI	80,00	100,00	125,00
3	LRBRL	80,00	100,00	125,00
4	BRPL	80,00	100,00	125,00
5	BRPI	80,00	100,00	125,00
6	LRSDKP	80,00	100,00	125,00
7	LRMPHP	80,00	100,00	125,00
8	LPTK	80,00	100,00	125,00
9	LRPT	80,00	100,00	125,00

Sumber : Nota Dinas Nomor 41/SJ.7/PL.410/II/2026

Berdasarkan perbandingan capaian IK 6 antar satuan kerja, seluruh satker binaan Sekretariat BPPSDMKP menetapkan target yang sama sebesar 80% dan berhasil merealisasikan capaian 100%, sehingga masing-masing mencapai persentase capaian sebesar 125%. Capaian yang seragam ini menunjukkan bahwa seluruh satker telah mematuhi ketentuan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP secara tepat waktu dan konsisten. Kepatuhan dan ketepatan pengumuman RUP tersebut sekaligus menjadi faktor penentu keberhasilan capaian kinerja ini.

Keseragaman capaian kinerja tersebut mencerminkan adanya kesamaan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, serta efektivitas koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Sekretariat BPPSDMKP. Dengan capaian 100% pada seluruh satker, pelaksanaan pengadaan di lingkungan BPPSDMKP telah mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kegiatan/Program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung capaian kinerja yaitu Kegiatan Layanan Umum. Pendataan belanja barang yang akan diumumkan awal tahun pada aplikasi SIRUP dilakukan berdasarkan data belanja barang pada DIPA/ RKAKL awal yang disahkan pada tanggal 2 Desember 2024. Dengan ketentuan tersebut BRBIH telah melaksanakan pendataan belanja barang yang akan diumumkan pada aplikasi SIRUP, penginputan rencana pengadaan pada aplikasi SIRUP update data pengadaan pada aplikasi SIRUP sesuai dengan data revisi belanja barang.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya kebijakan dan kebutuhan organisasi dilakukan beberapa penyesuaian atau update data pengadaan pada aplikasi SIRUP sesuai dengan data revisi belanja barang. Penyesuaian tersebut diawali pada Bulan Maret pasca adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan surat dari Plt Kepala Biro PBJ KKP Nomor

B.873/SJ.6/RC.420/III/2025 Tanggal 4 Maret 2025 perihal Upaya Optimalisasi Perencanaan PBJ (RUP Terumumkan TA 2025) pasca pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran. Penyesuaian pagu anggaran terumumkan pada aplikasi SIRUP telah dilakukan pada bulan April 2025 pasca pembukaan blokir anggaran, pemutakhiran revisi POK di bulan Juli serta penghapusan blokir pada bulan September dan Penambahan Pagu Pemeliharaan Pada Bulan Desember.

Dengan dilakukannya penyesuaian dan pemutakhiran data pengadaan pada aplikasi SIRUP sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran dan revisi belanja barang, keterkaitan antara capaian kinerja dan pemanfaatan anggaran menjadi bagian penting dalam menilai efektivitas penggunaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana data berikut:

Tabel 32. Efisiensi Anggaran IK 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	% Capaian Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	125,00	121,88	Layanan Umum	3.665.000	3.664.944	95,78	26,10

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Berdasarkan data kinerja dan anggaran, Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH ditargetkan sebesar 80% dan berhasil direalisasikan 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 125,00%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Layanan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp3.665.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.664.944. Penggunaan anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 26,10, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Selain mendukung IKU pengadaan, anggaran yang sama juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH, dengan target sebesar 80% dan realisasi 95%, sehingga capaian kinerja mencapai 118,75%. Pemanfaatan anggaran secara bersamaan untuk mendukung dua indikator kinerja tersebut mencerminkan adanya sinergi pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja secara simultan.

Secara keseluruhan, efisiensi anggaran pada layanan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyesuaian kebijakan dan revisi anggaran sepanjang tahun berjalan, BRBIH tetap mampu menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, serta optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

Indikator Kinerja 7

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkup BRBIH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran indikator ini dilakukan tahunan dengan target 80 (delapan puluh) menggunakan satuan persen dengan tingkat validitas Output Kendali Rendah, serta memiliki polarisasi *maximize* yang berarti semakin tinggi nilainya menunjukkan tingkat kepatuhan yang semakin baik. Data dikelola oleh Biro Umum dan PBJ dengan jenis perhitungan Nilai Posisi Akhir didukung oleh bukti berupa Surat Sekretaris BPPSDM KP tentang Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDM KP.

Formula penghitungan tingkat kepatuhan ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari enam unsur utama dengan bobot yang bervariasi. Unsur tersebut meliputi tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025 yang terdiri dari ketersediaan dokumen (bobot 5%) dan pemanfaatannya

dalam penyusunan RKAKL (bobot 7.5%). Selanjutnya, terdapat penilaian terhadap tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN (bobot 25%) serta usulan pemindahtanganan atau penghapusan BMN untuk kondisi rusak berat (bobot 25%) yang diajukan kepada pengguna dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III tahun 2025. Selain itu, kepatuhan juga dinilai dari penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 yang didukung Berita Acara Serah Terima atau Pemakaian (bobot 20%), ketepatan waktu penyusunan Laporan BMN semesteran dan tahunan (bobot 12.5%), serta penyampaian usulan RKBMN Tahun 2027 (bobot 5%).

Capaian indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%) diukur berdasarkan hasil evaluasi dengan parameter yang telah ditetapkan berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:
 - a. Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2025 (bobot 5%)
 - b. Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
2. Tersedianya usulan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/ atau penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%);
6. Penyusunan/ Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%).

Berdasarkan parameter penilaian tersebut, melalui kegiatan layanan umum telah dilakukan penyusunan laporan BMN tahun 2024 pada bulan

Januari 2025, proses penyusunan laporan semester 1 selama Januari s.d Juni dan pada Triwulan III 2025 BRBIH telah melaksanakan kegiatan berupa:

1. Penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2025;
2. Penyampaian usulan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan portal KKP untuk:
 - a. Penghapusan BMN kondisi rusak berat;
 - b. PSP BMN;
 - c. RKBMN 2027

Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 Tanggal 15 Desember 2025 Perihal Capaian IKU "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025" menyatakan bahwa Capaian BRBIH melebihi target sebagaimana tabel perbandingan berikut:

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 7

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 7 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
				80	95	118,75	-	84	113,10

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN ini merupakan IK baru pada Tahun 2025 sesuai yang menjadi IK mandatory dari BPPSDMKP sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kepatuhan dalam pengelolaan BMN. Capaian BRBIH sebesar 95% dari target yang ditetapkan sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja 118,75%. Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN merupakan IK baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2029 sebesar 84%, capaian kinerja tahun 2025 telah mencapai 113,10%, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui lebih

awal. Hal ini menunjukkan bahwa BRBIH berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam hal perbandingan capaian satuan kerja level 3 lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Perbandingan Capaian IK 7 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRPSDI	80,00	100,00	125,00
2	LPTK	80,00	100,00	125,00
3	BRPI	80,00	100,00	125,00
4	LRMPHP	80,00	97,50	121,88
5	LRBRL	80,00	97,50	121,88
6	BRBIH	80,00	95,00	118,75
7	LRSDKP	80,00	90,00	112,50
8	BRPL	80,00	90,00	112,50
9	LRPT	80,00	85,00	106,25

Sumber : Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor

Hasil perbandingan capaian kinerja antar satuan kerja level 3 menunjukkan bahwa kinerja seluruh satker di atas target yang ditetapkan, dengan persentase capaian berkisar antara 106,25% hingga 125,00%. BRBIH dengan persentase capaian 118,75% berada pada kelompok satker dengan predikat “menengah”. Keberhasilan capaian ini didukung oleh komitmen pengelola BMN dalam menjalankan tugas dan

Indikator Kinerja ini didukung oleh Program/Kegiatan Layanan Umum yang digunakan juga untuk mendukung indikator kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya targte meliputi kegiatan penyusunan laporan bmn 2024, penyusunan laporan semester 1 tahun 2025, pengusulan penghapusan aset kondisi rusak berat, pengusulan penetapan status penggunaan aset, inventarisasi bmn, pengusulan rkbn 2027 sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran yang sama untuk mendukung dua indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Efisiensi Anggaran IK 7

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	% Capaian Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	118,75	121,88	Layanan Umum	3.665.000	3.664.944	95,78	26,10

Sumber : Data Primer BRBIH 2025

Berdasarkan data kinerja dan anggaran, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH ditargetkan sebesar 80% dengan capaian 95%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 118,75%. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Layanan Umum dengan pagu anggaran sebesar Rp3.665.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.664.944. Penggunaan anggaran tersebut menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 26,10, yang menunjukkan bahwa pengelolaan BMN Satker BRBIH telah dilakukan secara efektif dan efisien.

Selain mendukung IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH, anggaran yang sama juga dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung Indikator Kinerja Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH dengan target sebesar 80% dan realisasi 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 125%. Pemanfaatan anggaran secara bersamaan untuk mendukung dua indikator kinerja tersebut mencerminkan adanya sinergi pelaksanaan kegiatan, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja secara simultan.

Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)

Indikator ini mengukur perolehan manfaat langsung maupun tidak langsung dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang

dikelola oleh Satker PNBPN dan BLU di lingkup BPPSDM. Penerimaan ini menjadi bagian dari penerimaan Pemerintah Pusat di luar pajak dan hibah, yang mencakup pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan BMN, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Dasar hukum pengelolaannya merujuk pada berbagai regulasi, termasuk UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBPN dan beberapa Peraturan Pemerintah terkait.

Formula penghitungannya adalah dengan menjumlahkan Nilai PNBPN SDA dan Nilai PNBPN Lainnya untuk mendapatkan total Nilai PNBPN Sektor Kelautan dan Perikanan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah Rupiah dengan validitas Output Kendali Rendah. Sumber data berasal dari Biro Keuangan melalui aplikasi *Online Monitoring SPAN* (OM SPAN), dengan jenis perhitungan Nilai Posisi Akhir yang dilakukan pengukuran setiap triwulan. Bukti dukung yang diperlukan adalah Surat/Nota Dinas Biro Keuangan atau data realisasi pendapatan dari aplikasi OM SPAN/SIMPONI.

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. Obyek/Ruang Lingkup PNBPN: pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 178/BPPSDM.1/ KU.340/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Capaian Kinerja PNBPN Satuan Kerja BPPSDM Tahun 2025, capaian BRBIH dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja 8

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 8 - Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	166.602.430	178.976.725	181.774.000	195.154.380	107,36	9,04	255.256.313	76,45

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satker BRBIH pada tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar Rp181.774.000 dan berhasil direalisasikan Rp195.154.380, sehingga capaian kinerja mencapai 107,36%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp178.976.725, capaian PNBP tahun 2025 meningkat 9,04%, yang mencerminkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi PNBP BRBIH dari berbagai sumber layanan yaitu penjualan ikan hias, magot dan pemanfaatan lahan.

Selanjutnya, terhadap target jangka menengah tahun 2029 sebesar Rp255.256.313, capaian tahun 2025 telah mencapai 76,45%, yang menunjukkan bahwa kinerja PNBP BRBIH berada pada jalur yang positif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja satuan kerja binaan BPPSDMKP dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 37. Perbandingan Capaian IK 8 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRPI	408.640.000	460.318.570	112,65
2	BRBIH	181.774.000	195.154.380	107,36
3	BRPL	26.500.000	119.795.732	452,06
4	BRPSDI	2.200.000	33.815.448	1.537,07
5	LRBRL	14.050.000	32.635.772	232,28
6	LRSDKP	28.393.000	28.393.736	100,00
7	LPTK		13.459.398	-
8	LRPT		7.160.000	-
9	LRMPHP		3.416.975	-

Sumber : Nota Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 178/BPPSDM.1 / KU.340/II/2026

Merujuk pada perbandingan capaian PNBP antar satuan kerja, BRBIH merealisasikan PNBP sebesar Rp195.154.380 atau 107,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp181.774.000, sehingga menunjukkan kinerja positif dengan capaian di atas target. Ditinjau dari besaran persentase capaian, BRBIH menempati peringkat menengah dibandingkan satuan kerja lain, berada di bawah satker dengan lonjakan realisasi yang sangat tinggi, namun tetap menunjukkan kinerja yang stabil, terukur, dan berkelanjutan. Capaian ini mencerminkan perencanaan target yang relatif realistis serta kemampuan BRBIH dalam mengoptimalkan sumber-sumber PNBP yang ada, sehingga kontribusi terhadap penerimaan negara tetap terjaga.

Keberhasilan capaian BRBIH pada Tahun 2025 ini didukung oleh beberapa Faktor penentu diantaranya:

1. Telah dilaksanakan pemasaran hasil produksi melalui komunitas ikan;
2. Kerja sama dengan mitra dan *stakeholder*;
3. Pengelolaan produksi ikan hias yang lebih efisien;
4. Penyelenggaraan kegiatan Eduwisata dan kunjungan instansi;
5. Rapat tim PNBP dalam menentukan strategi pencapaian target.

Adapun setoran PNBP BRBIH Tahun 2025 bersumber dari:

1. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi sebesar Rp 44.772.480,- yang bersumber dari setoran sewa kolam.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp 49.593.900,- yang bersumber dari setoran sewa lahan dan bangunan (lapangan bola, aula dan tanah aliran sungai).
3. Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya sebesar Rp 100,788,000,- yang bersumber dari hasil setoran penjualan ikan dan magot.

Kegiatan/Program yang telah dan akan terus dilaksanakan dalam rangka mendukung tercapainya indikator ini yaitu Layanan Perkantoran dengan kegiatan berupa:

1. Budidaya ikan;
2. Budidaya Magot;
3. Pemeliharaan komoditas hasil samping kegiatan Pelatihan/ Magang/PKL;
4. Pengelolaan aset yang meliputi pemeliharaan aset agar dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan operasional, optimalisasi lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi dan sewa.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan dan program tersebut, capaian PNPB BRBIH juga perlu dilihat dari sisi pengelolaan anggaran yang mendukung layanan perkantoran. Ketercapaian target tidak hanya ditentukan oleh optimalisasi kegiatan produksi dan pemanfaatan aset, tetapi juga oleh kemampuan satuan kerja dalam menggunakan anggaran secara efisien dan tepat sasaran sehingga output dan pendapatan yang dihasilkan dapat dimaksimalkan. Rincian efisiensi anggaran pada indikator ini disajikan pada data berikut.

Tabel 38. Efisiensi Anggaran IK 8

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	195.154.380	107,36	Layanan Perkantoran	7.941.766.000	7.812.409.742	98,37	8,99

Sumber : Data primer BRBIH 2025

Berdasarkan data efisiensi anggaran, Nilai PNPB Satker BRBIH pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp181.774.000 dan direalisasikan sebesar 195.154.380, atau mencapai 107,36% dari target. Capaian tersebut didukung oleh anggaran Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp7.941.766.000 dan realisasi sebesar Rp7.812.409.742, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai 98,37%. Kondisi ini menunjukkan bahwa BRBIH mampu

menghasilkan kinerja PNBP yang melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien, tercermin dari adanya efisiensi sebesar 8,99%. Efisiensi tersebut menggambarkan pengelolaan anggaran yang cermat dan optimal, di mana dukungan layanan perkantoran dapat mendorong peningkatan PNBP.

Dengan tercapainya target pada tahun ini, diharapkan capaian PNBP BRBIH dapat terus meningkat secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan capaian PNBP antara lain melalui optimalisasi lahan yang tersedia untuk kegiatan produksi, baik ikan hias maupun magot, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi BRBIH dalam mendukung penerimaan negara dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Indikator Kinerja 9

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai) merupakan Indikator pengukuran seberapa informatif sebuah organisasi. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah untuk menyediakan akses terbuka dan transparan terhadap informasi publik kepada masyarakat. Prinsip ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Periode pengukuran capaian IKU ini dilakukan Tahunan dengan polarisasi maximize.

Untuk mencapai indikator ini, unit kerja harus memenuhi kriteria nilai tertentu, seperti total nilai pengungkit dan hasil minimal 75, nilai pengungkit minimal 40, serta bobot nilai per area pengungkit minimal 60%. Selain itu, komponen pemerintah yang bersih dan akuntabel harus mencapai minimal

18,25, sementara komponen pelayanan publik yang prima minimal 14. Formula pengukurannya didasarkan pada hasil penilaian LKE SAQ (*Self Assessment Quesioner*) oleh Tim Penilai Internal BPPSDM KP. Indikator ini menggunakan satuan nilai dengan validitas Output Kendali Rendah, bersifat *maximize*, dan dilakukan pengukuran tahunan dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan PPID KKP.

Capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH pada Tahun 2025 yang ditetapkan pada Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025 Tentang Hasil Penilaian Evaluasi Mandiri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 9

SK – 1 Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IK 9 - Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)									
Realisasi Tahun 2021-2024				2025				Target Jangka Menengah	
2021	2022	2023	2024	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
-	-	-	-	90,00	99,05	110,06	-	92	107,66

Sumber : Sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP

Berdasarkan hasil penilaian pada akhir Tahun 2025, Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH berhasil mencapai 99,05 melampaui target yang ditetapkan sebesar 90, dengan tingkat capaian 110,06%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan sepanjang tahun berjalan memberikan hasil yang sangat optimal. Sebagai indikator kinerja yang baru diterapkan pada tahun 2025, BRBIH mampu mencapai kinerja di atas target, yang mencerminkan kesiapan organisasi dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh.

Selain itu, capaian tersebut juga telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 sebesar 92, dengan persentase capaian 107,66%, sehingga menegaskan bahwa tata kelola layanan informasi publik di BRBIH telah berada pada kategori sangat informatif dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Untuk memperoleh gambaran posisi capaian BRBIH secara lebih komprehensif, berikut disajikan perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik antar satuan kerja sekretariat BPPSDMKP.

Tabel 40. Perbandingan Capaian IK 9 Satker Level 3 dibawah Pembinaan Sekretariat BPPSDMKP

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	BRPSDI	90	100,00	111,11
2	BRPI	90	100,00	111,11
3	BRBIH	90	99,05	110,06
4	LRMPHP	-	97,52	-
5	LRPT	80	94,18	117,73
6	BRPL	-	92,17	-
7	LRBRL	90	92,15	102,39
8	LRSDKP	80	80,11	100,14
9	LPTK	-	72,20	-

Sumber : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PPID-KKP/XII/2025

Mengacu pada data perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik antar satuan kerja, BRBIH ditetapkan dengan target 90 dan berhasil direalisasikan sebesar 99,05, sehingga capaian kinerjanya mencapai 110,06%. Hasil ini menunjukkan bahwa BRBIH mampu melampaui target yang ditetapkan dan berada pada kategori kinerja informatif. Meskipun terdapat satuan kerja lain yang mencatat persentase capaian lebih tinggi, capaian BRBIH tetap menempatkannya pada kelompok satuan kerja dengan kinerja tinggi, serta mencerminkan konsistensi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi publik. Secara umum, capaian seluruh satuan kerja menunjukkan komitmen yang positif terhadap keterbukaan informasi publik, dengan variasi capaian yang dipengaruhi oleh karakteristik dan kebijakan masing-masing unit.

Capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya dan dukungan yang telah dilaksanakan secara konsisten oleh BRBIH dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Pencapaian ini didorong oleh beberapa faktor pendukung diantaranya penerapan tata kelola yang baik, komitmen pimpinan dan seluruh jajaran, serta pengelolaan layanan informasi yang terstruktur dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan layanan informasi publik yang terstruktur, capaian kinerja ini didukung oleh pelaksanaan program Layanan Hubungan Masyarakat. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung pencapaian target, khususnya melalui penyediaan dan pengumuman Informasi Wajib Berkala, yang meliputi:

1. Informasi Profil Unit Organisasi, antara lain deskripsi tugas dan fungsi, pengumuman LHKPN pejabat negara, serta informasi jumlah dan persentase pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN;
2. Informasi Program dan Kegiatan Organisasi, meliputi pengumuman program dan kegiatan Tahun 2025 dan Tahun 2024, serta realisasi kegiatan dan capaian kinerja;
3. Informasi Keuangan, meliputi pengumuman Laporan Keuangan Tahun 2024 berupa LRA, Neraca, CALK, daftar aset dan investasi, serta informasi keuangan lainnya seperti DIPA, RKA-KL, dan realisasi penyerapan anggaran;
4. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi pengumuman rencana umum pengadaan dan dua paket pengadaan dengan nilai tertinggi.
5. Mengumpulkan data informasi publik
6. Mengumumkan data informasi publik pada media elektronik dan non elektronik

Selain itu, BRBIH juga mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagai bagian dari pemenuhan

kewajiban keterbukaan informasi public yang dapat diakses melalui website PPID.

Tidak hanya didukung oleh kelengkapan dan keteraturan penyediaan informasi publik, capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang mendukung pelaksanaan Layanan Hubungan Masyarakat. Efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut tercermin dari penggunaan anggaran yang efisien dalam mendukung pencapaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41. Efisiensi Anggaran IK 9

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90	99,05	110,06	Layanan Hubungan Masyarakat	3.200.000	3.160.530	98,77	11,29

Sumber : Data primer BRBIH 2025

Mengacu pada data efisiensi anggaran, Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH pada tahun 2025 ditetapkan dengan target 90 dan direalisasikan sebesar 99,05, sehingga capaian kinerja mencapai 110,06%. Capaian tersebut didukung oleh anggaran Layanan Hubungan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp3.200.000 dan realisasi sebesar Rp3.160.530, atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,77%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang melampaui target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang efisien, tercermin dari adanya efisiensi sebesar 11,29%. Efisiensi tersebut menggambarkan pengelolaan anggaran yang cermat dan optimal, di mana dukungan kegiatan kehumasan dan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara efektif tanpa menghabiskan seluruh pagu anggaran yang tersedia.

Secara keseluruhan, Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH merupakan tolok ukur fundamental dalam menilai sejauh mana organisasi mampu menjalankan fungsinya sebagai badan publik yang informatif dan transparan. Dengan keberhasilan meraih nilai 99,05 atau mencapai 110,06% dari target yang ditetapkan pada tahun 2025, BRBIH telah menunjukkan keunggulan dalam tata kelola informasi publik. Capaian yang telah melampaui target jangka menengah tahun 2029 ini menjadi bukti nyata bahwa prinsip akuntabilitas dan keterbukaan telah terinternalisasi dengan baik dalam sistem kerja organisasi.

Selanjutnya, BRBIH diharapkan dapat terus konsisten dalam mempertahankan kualitas layanan informasi serta senantiasa adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Harapannya, keberhasilan ini menjadi pemicu untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan data yang semakin akurat dan mudah diakses. Dengan fondasi transparansi yang kuat ini, BRBIH berkomitmen untuk terus menjaga integritas layanan publik secara berkelanjutan guna mendukung terciptanya efektivitas birokrasi yang lebih luas dan berdampak nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pengelolaan program kerja. Pada tahun 2025, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) mengelola total alokasi pagu sebesar Rp7.961.516.000,- yang bersumber sepenuhnya dari Rupiah Murni (RM). Dari alokasi tersebut, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp7.839.453.876,- atau setara dengan 98,47%.

1. Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

Secara terperinci, komposisi penggunaan anggaran BRBIH pada tahun 2025 terbagi ke dalam dua kategori utama belanja, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 42. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.433.545.041	97,23
Belanja Barang	3,401,539,000	3.398.446.142	99,91
Total	7,961,516,000	7.831.991.183	98,37

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Tingginya total (98,47%) menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan belanja pegawai telah terlaksana secara maksimal sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Penggunaan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk membiayai 1 Sasaran Kegiatan dengan 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Seluruh indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, di mana target kinerja mampu dicapai dengan optimalisasi anggaran yang tersedia. Penyerapan anggaran terbesar dialokasikan pada indikator Nilai PNBPN Satker sebagai bagian dari dukungan operasional layanan, sebagaimana data berikut:

Tabel 43. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	3.290.000	3.254.970	98,94
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)			
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	500.000	478.900	95,78
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	5.895.000	5.863.797	99,47
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	3.200.000	3.158.300	98,70
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	3.665.000	3.664.944	100,00

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)			
		8 Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	7.941.766.000	7.812.409.742	98,37
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	3.200.000	3.160.530	98,77
Total			7.961.516.000	7.831.991.183	98,37

Sumber: Data Primer BRBIH 2025

Keberhasilan realisasi anggaran pada setiap indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari penyesuaian strategi pendanaan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan. Dalam upaya merespons dinamika kebutuhan organisasi serta kebijakan strategis di tingkat kementerian, BRBIH melakukan serangkaian penyesuaian administratif pada dokumen anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa alokasi dana tetap relevan dengan skala prioritas dan target kinerja yang ingin dicapai.

3. Perubahan Anggaran (Revisi DIPA)

Dalam rangka menjaga fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, selama tahun 2025 telah dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali revisi DIPA. Perubahan ini dilakukan untuk merespons kebijakan strategis kementerian. Rincian mengenai perubahan dan perkembangan pagu anggaran tersebut dirangkum dalam poin berikut:

Tabel 44. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2025

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Bulan pengesahan	2 Desember 2024	-
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	-
	Belanja barang	6.410.000.000	-
	Total	10.969.977.000	
1	Tanggal	2 Desember 2025	21 Februari 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
	Keterangan	Revisi Blokir Anggaran berdasarkan: Surat dari Sekretaris BPPSMKP Nomor B.2492/BPPSDM.1/RC.420/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Perihal Penyampaian Efisiensi Anggaran Lingkup BPPSDM TA 2025	
2	Tanggal	21 Februari 2025	9 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Revisi Rekomposisi Blokir Anggaran berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-327/AG/AG.3/2025 Tanggal 9 April 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada revisi ke 2 ini tidak terdapat perubahan pagu per jenis belanja, hanya ada pembukaan blokir belanja gaji PPNPN dan PJLP, belanja langganan daya dan jasa, serta honor keuangan.	
3	Tanggal	9 April 2025	21 April 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	
4	Tanggal	21 April 2025	8 Juli 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	6.410.000.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	10.969.977.000
	Keterangan	Penyesuaian Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA	
5	Tanggal	8 Juli 2025	1 September 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	6.410.000.000	3.201.539.000
	Total Anggaran	10.969.977.000	7.761.516.000
	Keterangan	Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.5139/BPPSDM.1/RC.410/VIII/2025 Tanggal 12 Agustus 2025	

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
		Perihal Penghapusan Blokir Lingkup BPPSDM diinstruksikan kepada seluruh UPT lingkup BPPSDMKP untuk melakukan penghapusan blokir untuk mendukung revitalisasi prasarana dan sarana pendidikan kelautan dan perikanan	
6	Tanggal	1 September 2025	3 Oktober 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	3.201.539.000	3.201.539.000
	Total Anggaran	7.761.516.000	7.761.516.000
	Keterangan	Berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan PPPK Nomor 6/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025 dan Nomor 8/KEPMEN-KP/KP.320/IX/2025	
7	Tanggal	3 Oktober 2025	19 November 2025
	Belanja Pegawai	4.559.977.000	4.559.977.000
	Belanja barang	3.201.539.000	3.401.539.000
	Total Anggaran	7.761.516.000	7.961.516.000
	Keterangan	Berdasarkan Surat Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor S-986/AG/AG.3/2025 Tanggal 19 November 2025 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran TA 2025 lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Secara umum, kinerja penyerapan anggaran BRBIH Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sangat baik, tercermin dari angka realisasi yang mendekati 100%. Capaian kinerja fisik yang dihasilkan mampu melampaui target pada seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan pada Tahun 2025 dengan penggunaan anggaran yang efisien.

Namun demikian, secara teknis organisasi tetap memandang perlu adanya optimasi berkelanjutan. Langkah-langkah strategis seperti monitoring dan evaluasi berkala akan terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh Rencana Operasional Kegiatan (ROK) berjalan presisi sesuai jadwal yang telah ditetapkan (Halaman III DIPA). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penumpukan realisasi di akhir tahun dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

C. Efisiensi Anggaran, Sumber Daya, dan Aset

Balai Riset Ikan Hias sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

1. Efisiensi Anggaran

Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel: capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit EselonI/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara nilai pencapaian kinerja dengan persentase realisasi anggaran yang telah diserap untuk mencapai kinerja.

Tabel 45. Perhitungan Efisiensi Anggaran BRBIH Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Capaian Tahun 2025	%	% Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	101,09	104,35	Layanan Manajemen Keuangan	3.290.000	3.254.970	98,94	5,41
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	116,67						
	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	84,25	120,00		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	500.000	478.900	95,78	7,59

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Capaian Tahun 2025	%	% Rata-Rata	Kegiatan Pendukung RKAKL	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	111,34		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.895.000	5.863.797	99,47	40,39
	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	88,89	104,01		Layanan Manajemen SDM	3.200.000	3.158.300	98,70	9,71
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	104,71	121,88	Layanan Umum	3.665.000	3.664.944	95,78	26,10
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	120,00						
	Nilai PNBP Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	195.154.380	120,00		Layanan Perkantoran	7.941.766.000	7.812.409.742	98,37	8,99
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90	99,05	104,90		Layanan Hubungan Masyarakat	3.200.000	3.160.530	98,77	11,29
NKO				110,73		Total Anggaran	7.961.516.000	7.831.991.183	98,37	12,36

Sumber: Data Primer BRBIH 2025

Secara umum, seluruh indikator kinerja kegiatan menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan, dengan persentase capaian berada pada rentang 101,09% hingga 120,00%. Rata-rata capaian kinerja berada pada kategori sangat baik, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan di lingkungan BRBIH.

Dari sisi dukungan anggaran, kegiatan-kegiatan pendukung yang tercantum dalam RKAKL mampu direalisasikan secara optimal dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, yaitu berada pada kisaran 95,78% hingga 99,47%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan pemborosan anggaran, sekaligus tetap menjaga kualitas capaian kinerja.

Efisiensi anggaran yang dihasilkan bervariasi pada setiap kegiatan pendukung, dengan tingkat efisiensi antara 5,41% hingga 40,39%. Efisiensi tertinggi tercapai pada Layanan Perencanaan dan Penganggaran, yang

berhasil mendukung peningkatan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH hingga 111,34% dengan realisasi anggaran sebesar 99,47% dari pagu yang tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Manajemen SDM, Layanan Hubungan Masyarakat, serta Layanan Umum juga menunjukkan kinerja yang efisien, di mana capaian indikator kinerja melebihi target dengan realisasi anggaran di bawah pagu. Kondisi ini mencerminkan adanya pengendalian biaya yang baik tanpa mengurangi kualitas layanan dan hasil yang dicapai.

Sementara itu, Layanan Perkantoran sebagai kegiatan dengan pagu anggaran terbesar tetap mampu mendukung pencapaian indikator strategis, termasuk peningkatan Nilai PNBP Satker BRBIH, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,37% dan efisiensi sebesar 8,99%. Hal ini menunjukkan bahwa belanja operasional telah dikelola secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, total pagu anggaran sebesar Rp7.961.516.000 direalisasikan sebesar Rp7.831.991.183 atau 98,37%, dengan tingkat efisiensi mencapai 12,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja BRBIH Tahun 2025 tidak hanya melampaui target yang ditetapkan, tetapi juga dicapai melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2. Efisiensi SDM

Sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRBIH menghadapi dinamika penyesuaian sumber daya manusia seiring dengan perubahan kelembagaan riset nasional. Dalam kondisi tersebut, efisiensi dan optimalisasi SDM menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi BRBIH, khususnya dalam mendukung

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Tahun 2025 ini total pegawai BRBIH berjumlah 65 orang, dengan komposisi 26 PNS (40%), 18 P3K penuh waktu (24,7%), 5 P3K paruh waktu (7,7%), dan 16 PJLP (24,6%). Komposisi ini menunjukkan bahwa BRBIH menerapkan pola pengelolaan SDM yang adaptif dengan mengombinasikan ASN dan non-ASN untuk menjamin keberlangsungan layanan dan operasional.

Dari sisi jabatan, struktur SDM didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 39 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 10 orang, dengan hanya 2 jabatan struktural. Kondisi ini mencerminkan organisasi yang relatif ramping dan operasional, di mana sumber daya manusia lebih difokuskan pada fungsi teknis dan layanan dibandingkan fungsi struktural. Pola ini sejalan dengan arah kebijakan pasca-Perpres 78/2021 yang menekankan efektivitas organisasi dan penguatan fungsi pelaksana.

Dari aspek pendidikan, mayoritas pegawai BRBIH berlatar belakang S1 dan S2, yang menunjukkan kapasitas SDM yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas teknis, administratif, serta layanan pendukung kegiatan riset terapan, pelatihan, dan pengelolaan sarana prasarana. Kualitas pendidikan ini menjadi modal penting dalam meningkatkan produktivitas kerja tanpa harus melakukan penambahan jumlah pegawai.

Komposisi jenis kelamin yang relatif seimbang, yaitu 26 pegawai laki-laki (40,00%) dan 23 pegawai perempuan (35,38%), juga mendukung distribusi beban kerja yang proporsional dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan pengelolaan SDM yang inklusif serta mendukung stabilitas organisasi dalam jangka menengah.

Secara keseluruhan, pasca berlakunya Perpres Nomor 78 Tahun 2021, BRBIH mampu menjaga efisiensi SDM melalui struktur organisasi yang

ramping, komposisi pegawai yang fleksibel, serta optimalisasi peran jabatan fungsional dan tenaga pendukung. Pendekatan ini memungkinkan BRBIH tetap mencapai target kinerja organisasi secara optimal, meskipun berada dalam masa transisi kelembagaan dan penyesuaian kebijakan nasional di bidang riset dan inovasi.

3. Efisiensi Aset

Efisiensi pengelolaan aset di BRBIH diwujudkan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi balai, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi dan layanan kepada masyarakat. Aset yang dimiliki tidak hanya digunakan sebagai fasilitas pendukung operasional, tetapi juga dimaksimalkan sebagai instrumen peningkatan produktivitas, edukasi, dan kontribusi PNBP.

Efisiensi aset juga tercermin pada pemanfaatan hatchery/hanggar (Aquaria dan klaster budidaya) yang digunakan secara spesifik sesuai komoditas, seperti budidaya ikan hias platy, koi, koki, discus, arwana, serta pengembangan klaster Loca Feed untuk budidaya magot dan produksi pakan berbasis hasil samping. Penataan fungsi ruang dan komoditas ini memungkinkan penggunaan sarana budidaya secara optimal, menghindari tumpang tindih kegiatan, dan meningkatkan hasil produksi.

Pada kelompok kolam dan bak pemeliharaan, pemanfaatan kolam beton, kolam tanah, dan bak beton dilakukan sesuai karakteristik ikan dan tahap budidaya. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan tingkat kelangsungan hidup ikan, tetapi juga mendukung optimalisasi lahan dan sarana yang tersedia agar menghasilkan output secara maksimal.

Selain aset produksi, gedung penunjang seperti gedung administrasi, gedung instruktur, guest house, showroom, musholla, dan stokist room dimanfaatkan secara fungsional untuk mendukung layanan perkantoran, kegiatan pelatihan, magang/PKL, edukasi masyarakat, serta kelancaran

operasional balai. Pemanfaatan guest house dan showroom juga memberikan nilai tambah dalam mendukung kegiatan pelayanan dan promosi ikan hias.

Sebagai bentuk efisiensi lanjutan, BRBIH juga melakukan optimalisasi lahan melalui pemanfaatan oleh pihak ketiga, antara lain untuk penempatan mesin ATM, pengelolaan kafetaria, dan penyediaan lahan parkir. Kerja sama ini memungkinkan aset lahan tetap terpelihara, memberikan kemudahan layanan bagi pegawai dan pengunjung, serta berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tanpa mengganggu fungsi utama balai.

Secara keseluruhan, efisiensi aset di BRBIH ditunjukkan melalui pemanfaatan fasilitas secara terpadu, produktif, dan bernilai tambah. Pendekatan ini memastikan bahwa aset negara yang dikelola tidak hanya mendukung pencapaian kinerja organisasi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan edukatif secara berkelanjutan.

D. Capaian Lainnya

Selain pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) juga berkomitmen dalam melaksanakan berbagai inisiatif strategis dan program aksi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta sektor kelautan dan perikanan secara luas. Capaian kinerja lainnya ini merupakan manifestasi dari peran aktif satuan kerja dalam merespons kebutuhan riil di lapangan serta mendukung program prioritas kementerian melalui inovasi dan pemberdayaan.

Program unggulan yang menjadi capaian strategis lainnya adalah LoCa Feed Community (LFC). Inovasi ini dibangun sebagai wadah kolaborasi antara BRBIH, masyarakat sekitar, dan mitra industri (hotel/restoran) untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam pemilahan sampah organik makanan (*food waste*) langsung dari sumbernya. Melalui teknologi biokonversi

menggunakan larva *Black Soldier Fly* (BSF), sisa makanan yang semula menjadi beban lingkungan diubah menjadi bahan baku pakan ikan yang bernilai ekonomi. Inovasi ini merupakan bentuk respon nyata terhadap permasalahan sampah organik yang mencapai 45% dari total sampah nasional, di mana sumber tertingginya berasal dari aktivitas rumah tangga.

Hingga tahun 2025, program LFC telah menunjukkan perkembangan signifikan yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Ekosistem Partisipasi: Melibatkan 165 rumah tangga, 4 hotel mitra, dan 12 restoran dalam sistem pemilahan sampah organik secara mandiri.
2. Dampak Lingkungan: Berhasil mengelola dan memanfaatkan food waste terpilah sebanyak 58 hingga 66 ton per tahun, sehingga secara signifikan mengurangi beban pembuangan sampah ke TPA.
3. Kemandirian Bahan Baku Pakan: Menghasilkan produk antara 4-5 ton larva BSF dan turunannya per tahun sebagai alternatif protein terbarukan untuk pakan ikan.
4. Edukasi dan Literasi: Pelaksanaan 18 workshop dan puluhan kunjungan studi yang telah mengedukasi ribuan peserta mengenai pentingnya ekonomi sirkular.

Berikut adalah uraian mendalam mengenai mekanisme kerja, capaian indikator, serta dampak sosial-ekonomi dari inovasi LoCa Feed Community yang telah diimplementasikan:

a) Perbandingan Kondisi Sebelum dan Sesudah Inovasi

Keberhasilan inovasi ini tercermin dari perubahan signifikan pada perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan limbah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 46. Dampak Inovasi LFC BRBIH

Indikator	Sebelum Inovasi	Setelah Inovasi
Kesadaran masyarakat dan industri terkait <i>food waste</i>	Belum mengetahui dampak, cara pemilahan dan pengelolaan <i>food waste</i>	memahami dampak, potensi, cara pemilahan dan pengelolaan <i>food waste</i>
Jumlah partisipan LFC	Belum ada partisipan yang terlibat	Partisipasi masyarakat: 65 rumah tangga, 5 komunitas (100 rumah tangga) Partisipasi industri: 4 hotel, 13 restoran
Volume <i>food waste</i> yang diolah/dimanfaatkan	Belum ada pemanfaatan sampah organik	<i>Food waste</i> yang berhasil dikelola 58-66 ton/ tahun
Produk hasil pengelolaan <i>food waste</i>	Belum ada produk yang dihasilkan.	Menghasilkan 6 produk: larva BSF, pelet ikan, LoCaFeed kering, tepung, minyak LarvaBSF, granul pupuk organik
Pemanfaatan produk pengelolaan <i>food waste</i>	Belum ada pengelolaan <i>food waste</i> yang dimanfaatkan kembali	Pakan ikan / unggas, bahan baku pakan, pupuk organik
Komunitas peduli	Belum ada komunitas peduli <i>food waste</i>	Terbentuk komunitas <i>food waste</i>
Dampak terhadap lingkungan dan ekonomi	Tidak peduli dengan <i>food waste</i> yang dibuang ke lingkungan	Mulai tercipta kepedulian

Sumber: Data Primer BRBIH 2025

b) Dampak Strategis dan Keberlanjutan

Implementasi LFC tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mendukung target-target pembangunan nasional (SDGs) dan Asta Cita:

1. Pemberdayaan SDM

Memberdayakan kelompok perempuan (PKW) yang selama Tahun 2025 diikuti oleh ibu rumah tangga sekitar Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebanyak 63 anggota melalui pelatihan teknik biokonversi dan pembuatan pakan mandiri.

2. Efektivitas Lingkungan

Mengurangi emisi karbon dan metana dari sampah organik serta mengurangi beban biaya iuran sampah di tingkat komunitas.

3. Kemandirian Pangan

Mendukung ekonomi biru dengan menyediakan bahan baku pakan lokal, sehingga mengurangi ketergantungan pembudidaya pada pakan komersial.

4. Keberlanjutan Manajerial

Didukung oleh SOP produksi yang ketat dan sistem monitoring berbasis aplikasi digital (<https://lfc.balaiikanhias.online/>) untuk memantau volume sampah secara *real-time*

Keberhasilan inovasi LoCa Feed Community (LFC) dalam mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat telah mendapat pengakuan luas di tingkat nasional. Puncaknya, inovasi ini berhasil terpilih sebagai salah satu pemenang dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pencapaian ini mengukuhkan posisi BRBIH sebagai unit kerja yang mampu menghasilkan solusi konkret, aplikatif, dan berdampak luas bagi masyarakat serta lingkungan.

Salah satu pilar utama kekuatan inovasi ini terletak pada aspek pemberdayaan perempuan, khususnya ibu-ibu rumah tangga di lingkungan sekitar BRBIH. Melalui komunitas LFC, para ibu berperan aktif sebagai motor penggerak dalam:

- **Pemilahan Sampah Mandiri:** Melakukan pemilahan sisa organik makanan langsung dari dapur rumah tangga untuk memastikan bahan baku biokonversi tidak tercampur sampah lain.
- **Edukasi Komunitas:** Menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan limbah organik kepada lingkungan sekitar.
- **Peningkatan Ekonomi Keluarga:** Memanfaatkan produk turunan biokonversi, seperti pupuk organik, untuk mendukung kemandirian pangan skala rumah tangga maupun sebagai peluang usaha baru.

Capaian kinerja BRBIH tahun 2025 menunjukkan sinergi yang optimal antara efektivitas anggaran sebesar 98,47% dan NKO sebesar 110,73% dengan inovasi pelayanan publik yang nyata. Keberhasilan inovasi LoCa Feed Community (LFC) meraih penghargaan di tingkat Nasional (KemenPANRB) menjadi bukti transformasi limbah organik menjadi protein bernilai ekonomi bagi komunitas. Keterlibatan aktif kelompok perempuan dan industri dalam mengelola 58–66 ton sampah organik per tahun mempertegas peran BRBIH dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular yang inklusif.

Ke depan, BRBIH berkomitmen untuk memperkuat skalabilitas inovasi LFC dan menjaga konsistensi transparansi informasi publik. Dengan fondasi kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada masyarakat, BRBIH optimis dapat terus memberikan kontribusi strategis bagi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.



Bab 4

Penutup

IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pada aplikasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilai Kinerja Organisasi BRBIH Tahun 2025 tercatat sebesar 110,73% dengan penyerapan anggaran sebesar 98,37%, yang mencerminkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tinggi dalam mendukung Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, sebagaimana data NKO berikut :



Sumber : Aplikasi Kinerjaku 2026

Gambar 13. Dashboard Kinerjaku BRBIH level 3 BRBIH

Dengan rincian NKO pada masing-masing IKU disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 47. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2025

No	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	CAPAIAN TAHUN 2025	%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025					110,73
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85	85	100,00
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92	100	108,70
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5	84,25	103,37
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5	100	120,00
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82	88,89	108,40
		6 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80	100	120,00
		7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80	95	118,75
		8 Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000	195.154.380	107,36
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90	99,05	110,06

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan data diatas, capaian Tahun 2025 didukung oleh keberhasilan pemenuhan seluruh 9 Indikator Kinerja (IK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan 4 IK berstatus biru dan 5 IK berstatus hijau, di mana seluruh indikator mencapai nilai $\geq 100\%$ dari target. Indikator terkait tata kelola dan akuntabilitas menunjukkan performa yang kuat, antara lain pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan yang mencapai 100%, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 108,70%, serta Penilaian Mandiri SAKIP sebesar 103,37%, yang menggambarkan konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas kinerja.

Pada aspek perencanaan dan pengelolaan sumber daya, BRBIH juga mencatat capaian yang sangat menonjol. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 120,00%, Indeks Profesionalitas ASN sebesar 108,40%, serta persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP mencapai 120,00%, yang menunjukkan kualitas perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan SDM yang semakin baik dan tertib regulasi. Selain itu, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN sebesar 118,75% menegaskan komitmen BRBIH dalam pengelolaan aset negara secara akuntabel dan optimal.

Dari sisi kinerja substantif dan kontribusi terhadap penerimaan negara, Nilai PNBP Satker BRBIH terealisasi sebesar Rp 195.154.380 atau 107,36% dari target, mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, layanan perkantoran, serta kegiatan produksi yang mendukung fungsi balai. Sementara itu, Nilai Keterbukaan Informasi Publik sebesar 110,06% menunjukkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang informatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan capaian seluruh indikator berada pada kategori baik hingga sangat baik, serta tren kinerja triwulanan yang konsisten berada di zona hijau dan biru, kinerja BRBIH Tahun 2025 dapat disimpulkan telah berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Capaian ini menjadi fondasi yang kuat bagi BRBIH untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus memperkuat kontribusi dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Permasalahan dan Rekomendasi

BRBIH telah melakukan upaya pencapaian target kinerja di Tahun 2025. Hal ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target masing-masing IKU yang ditetapkan. Seluruh IKU telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan tiga dari sembilan IKU yang

ditargetkan telah mencapai nilai maksimal. Nilai ini tentunya perlu dipertahankan dengan melakukan pengawalan guna memastikan nilai ini dapat tetap optimal di tahun berikutnya.

Salah satu permasalahan berdasarkan sasaran kinerja utama adalah belum optimalnya nilai IP ASN BRBIH, bahkan nilai ini cenderung turun dibandingkan tahun 2024. Dari empat dimensi penilaian, terdapat satu dimensi yang mengalami penurunan, yaitu pada dimensi kompetensi yang memiliki bobot paling tinggi diantar dimensi lainnya. Rekomendasi yang diberikan untuk mengupayakan peningkatan nilai ini adalah dengan memperhatikan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi sebagaimana tercantum pada Surat Edaran MenPANRB Nomor 3 tahun 2023 perihal Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMAR www.kkp.go.id SUREL brbihdepok13@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR: 19/BRBIH/RC.610/I/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2025;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2025 Tanggal 2 Desember 2024;
7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Kepala Pusat Riset Perikanan KKP TA. 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025;
 - b. Ketua Tim Penyusun:
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2025, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

- c. Anggota Tim Penyusun:
Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2025;
- d. Sekretariat :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2025 lingkup BRBIH.
- e. Kontributor:
Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 Januari 2025

Kepala Pengguna Anggaran



HARYADI D

Tembusan:

- 1. Sekretaris BPPSDM KP;
- 2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK

Nomor : 19/BRBIH/RC.610/1/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum
3	Anggota Tim Penyusun	1. Subkoordinator Kelompok Tata Operasional 2. Subkoordinator Kelompok Tata Usaha 3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis
4	Sekretariat	1. Shella Savitri 2. Iswahyudi 3. Susiyanti 4. Yuni Setyowati 5. Ipan Dahniar
5	Kontributor	1. Ifana Agustina 2. Fitri Rahmawati 3. Dewinta Hesti Widyastantri

Ditetapkan di Depok

Tanggal 2 Januari 2025

KELOMPOK SA PENGGUNA ANGGARAN



HARYADI D

Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL hpsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joni Haryadi**

Jabatan : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**

Jabatan : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

Pihak Kesatu
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias


Joni Haryadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8.	Nilai PNBPN Satker BRBIH (Rupiah)	210.000.000
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10,969,977,000
Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2025		10,969,977,000

Jakarta, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


Rudi Alek Wahyudin

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias


Joni Haryadi



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bpsdmi@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	85
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,5
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82
		6.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BRBIH (%)	80
		8.	Nilai PNPB Satker BRBIH (Rupiah)	181.774.000
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	7.961.516.000
Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2025		7.961.516.000

Jakarta, 5 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D



BRBIH

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran
MAS, Kec. Pancoran Mas, Kota
Depok, Jawa Barat 16436